

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan pada dasarnya adalah suatu proses untuk melakukan suatu perubahan pada indikator sosial maupun ekonomi menuju ke arah yang lebih baik dan berkesinambungan. Keberhasilan pembangunan diukur dari berbagai hal, salah satunya yaitu dengan mengukur ketersedianya sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas. Manusia merupakan potensi dan kekayaan yang dimiliki dari suatu negara, oleh karena itu manusia harus selalu menjadi target pembangunan dari suatu negara. Karena sumber daya manusia yang berkualitas akan menjadikan potensi bagi pembangunan suatu negara, namun sebaliknya jika sumber daya manusia di suatu negara kurang berkualitas maka hanya akan menjadi beban bagi pembangunan di suatu negara tersebut (Todaro, 2006).

Pembangunan dibutuhkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di suatu negara, karena kesejahteraan masyarakat merupakan tujuan akhir dari proses pembangunan. Kesejahteraan yang dimaksudkan antara lain: masyarakat dapat menikmati umur panjang, sehat, mendapatkan pendidikan yang baik dan memiliki kemampuan produksi yang optimal. Pembangunan manusia menempatkan manusia sebagai tujuan akhir dari proses pembangunan, bukan merupakan alat dari proses pembangunan itu sendiri. Keberhasilan proses pembangunan manusia dapat terlihat dengan keberhasilan suatu negara mengatasi permasalahan-permasalahan mendasar

di negaranya, misalnya masalah kemiskinan, pengangguran, buta huruf dan gizi buruk (Kacaribu, 2013).

United Nations Development Programme (UNDP) sebuah lembaga yang berwenang untuk mengukur Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjelaskan bahwa pembangunan manusia merupakan proses memperluas pilihan-pilihan penduduk untuk membangun hidupnya yang dianggap berharga. Kualitas sumber daya manusia dapat dilihat dari kualitas tingkat pendidikan, kesehatan dan juga perekonomian yang semakin baik. Keberhasilan suatu pembangunan dapat diukur menggunakan berbagai parameter, antara lain yang sedang populer saat ini adalah dengan menggunakan *Human Development Index* (HDI) atau Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (UNDP,1995).

Indeks Pembangunan Manusia (*Human Development Index*) adalah salah satu indikator untuk mengukur kualitas sumber daya manusia (SDM). Indeks ini dikembangkan pada tahun 1990 oleh Amartya Sen dan Manhub ul Haq dan dibantu oleh Gustav Ranis dan Lord Meghnan Desai. Sejak saat itu IPM digunakan oleh UNDP sebagai pengukur perbandingan dari harapan hidup, pendidikan dan ekonomi. Sebagian negara di dunia, baik negara maju ataupun negara berkembang menggunakan *Human Development Index* (HDI) atau Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dalam mengukur kualitas sumber daya manusianya (UNDP,1995).

Yusri (2010) menyatakan bahwa ada tiga alasan pembangunan manusia yang perlu diperhatikan, dikarenakan pertama, banyak negara berkembang

(termasuk Indonesia) berhasil mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi tapi gagal mengurangi masalah kesenjangan sosial, ekonomi dan juga kemiskinan yang terus terjadi. Kedua, banyak negara maju yang berpendapatan tinggi masih belum mampu mengatasi masalah-masalah sosial seperti narkoba, alkohol, AIDS, gelandangan, serta Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Ketiga, sementara beberapa negara yang masih berpendapatan rendah mampu mencapai pembangunan manusia yang tinggi, jika negara tersebut dapat menggunakan secara bijaksana semua sumber daya yang ada, untuk mengembangkan kemampuan dasar manusia.

Untuk mengukur ketiga pilihan tersebut UNDP menyusun IPM yang merupakan ukuran perbandingan tiga dimensi tentang pembangunan manusia. Pertama yaitu, panjang umur dan kesehatan, yang diukur menggunakan angka harapan hidup saat lahir. Kedua, pendidikan diukur menggunakan harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah. Ketiga, standar hidup atau biasa disebut ekonomi yang diukur menggunakan paritas daya beli (PPP) atau penghasilan. Ketiga dimensi tersebut sangat penting untuk menentukan tingkat kemampuan suatu negara untuk meningkatkan kualitas SDM. Ketiga unsur tersebut saling mempengaruhi dan juga dipengaruhi oleh faktor-faktor lainnya, misalnya pertumbuhan ekonomi, kebijakan negara dan lain-lain. Jadi IPM suatu negara dapat meningkat jika ketiga unsur itu dapat ditingkatkan, karena nilai IPM itu sendiri menjadi tolak ukur keberhasilan pembangunan ekonomi disuatu negara.

Menurut Tambunan yang dikutip dalam Kacaribu (2013) dengan kata lain, menyatakan bahwa terdapat korelasi positif antara nilai IPM dengan derajat keberhasilan pembangunan ekonomi di suatu negara. IPM memang bukanlah ukuran menyeluruh tentang pembangunan manusia, tetapi indeks ini memberikan sudut pandang yang lebih luas untuk menilai kemajuan manusia serta meninjau hubungan yang rumit antara penghasilan dan kesejahteraan (Irawan, 2009).

Modal manusia (*human capital*) adalah salah satu faktor penting dalam proses pertumbuhan ekonomi di suatu negara. Dengan modal manusia yang berkualitas akan membuat kinerja ekonomi menjadi lebih baik. Kualitas modal manusia ini dilihat dari aspek tingkat kesehatan, pendidikan dan kemiskinan. Jadi untuk memacu pertumbuhan ekonomi diperlukan pembangunan manusia, selain itu dibutuhkan kebijakan pemerintah yang mendorong peningkatan kualitas SDM itu sendiri (Yusri, 2010).

IPM sendiri dapat digunakan menjadi salah satu tolak ukur apakah suatu negara termasuk negara maju, negara berkembang ataupun negara terbelakang. Selain itu IPM juga dapat digunakan untuk mengukur pengaruh dari kebijakan ekonomi terhadap kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat suatu negara.

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah mengembangkan konsep pembangunan manusia dan menetapkan peringkat kinerja pembangunan manusia pada skala 0- 100 poin dengan kategori sebagai berikut:

1. Sangat Tinggi: IPM lebih dari 80,0 poin
2. Tinggi: IPM antara 70,0 – 79,9 poin
3. Sedang: IPM antara 55,0 – 69,9 poin
4. Rendah: IPM kurang dari 55,0 poin

Tabel 1.1

Peringkat Indeks Pembangunan Manusia Negara- negara ASEAN, Tahun 2015

No.	Negara	Skor IPM	Peringkat	Perubahan peringkat IPM	Rata-rata Pertumbuhan Tahunan (%)	Kelompok
1	Singapura	92,5	5	0	1,02	Sangat tinggi
2	Brunei Darussalam	86,5	30	1	0,40	Sangat tinggi
3	Malaysia	78,9	59	1	0,83	Tinggi
4	Thailand	74	87	4	1,02	Tinggi
5	Indonesia	68,9	113	3	1,07	Sedang
6	Vietnam	68,3	115	2	1,45	Sedang
7	Filipina	68,2	116	-7	0,61	Sedang
8	Laos	58,6	138	5	1,57	Sedang
9	Kamboja	56,3	143	1	1,84	Sedang
10	Myanmar	55,6	145	2	1,83	Sedang

Sumber: UNDP, Tahun 2015

Tabel 1.1 menunjukkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia di Negara Singapura Menduduki Peringkat Pertama di ASEAN dengan skor IPM 92,5, diikuti oleh Brunei Darussalam dengan skor IPM 86,5, Malaysia dengan skor IPM 78,9, Thailand dengan skor IPM 74, Indonesia dengan skor IPM 68,9, Vietnam dengan skor IPM 68,3, Filipina dengan skor IPM 68,2, Laos dengan skor IPM 58,6, Kamboja dengan skor IPM 56,3, sedangkan Myanmar menduduki peringkat terakhir dengan skor IPM 55,6.

Pernyataan UNDP baru-baru ini mengabarkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) untuk 2015 adalah 68,9 hal ini menempatkan

posisi Indonesia dalam Pembangunan Manusia menengah, dan peringkat 113 dari 188 negara dan wilayah. Nilai IPM meningkat 30,5 persen dari nilai pada tahun 1990, hal ini menggambarkan kemajuan yang telah di capai Indonesia.

Indeks Pembangunan Manusia digunakan untuk melihat kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada di suatu daerah. Semakin tinggi Indeks Pembangunan Manusia di suatu daerah, maka hasil pembangunan manusia oleh pemerintah semakin berhasil yang menjadi kunci pembangunan yang berkelanjutan.

Tabel 1.2
Peringkat Indeks Pembangunan Manusia Menurut Provinsi di Indonesia
Tahun 2013-2015

Provinsi	2013	2014	2015	Provinsi	2013	2014	2015
ACEH	68,3	68,81	69,45	NTB	63,76	64,31	65,19
SUMATERA UTARA	68,36	68,87	69,51	NTT	61,68	62,26	62,67
SUMATERA BARAT	68,91	69,36	69,98	KALIMANTAN BARAT	64,3	64,89	65,59
RIAU	69,91	70,33	70,84	KALIMANTAN TENGAH	67,41	67,77	68,53
JAMBI	67,76	68,24	68,89	KALIMANTAN SELATAN	67,17	67,63	68,38
SUMATERA SELATAN	66,16	66,75	67,46	KALIMANTAN TIMUR	73,21	73,82	74,17
BENGKULU	67,5	68,06	68,59	KALIMANTAN UTARA	67,99	68,64	68,76
LAMPUNG	65,73	66,42	66,95	SULAWESI UTARA	69,49	69,96	70,39
KEP.BANGKA BELITUNG	67,92	68,27	69,05	SULAWESI TENGAH	65,79	66,43	66,76
KEP.RIAU	73,02	73,4	73,75	SULAWESI SELATAN	67,92	68,49	69,15
DKI JAKARTA	78,08	78,39	78,99	SULAWESI TENGGARA	67,55	68,07	68,75
JAWA BARAT	68,25	68,8	69,5	GORONTALO	64,7	65,17	65,86
JAWA TENGAH	68,02	68,78	69,49	SULAWESI BARAT	61,53	62,24	62,96
DI YOGYAKARTA	76,44	76,81	77,59	MALUKU	66,09	66,74	67,05
JAWA TIMUR	67,55	68,14	68,95	MALUKU UTARA	64,78	65,18	65,91
BANTEN	69,47	69,89	70,27	PAPUA BARAT	60,91	61,28	61,73
BALI	72,09	72,48	73,37	PAPUA	56,25	56,75	57,25

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS)

Tabel 1.2 menunjukkan bahwa keseluruhan IPM provinsi mengalami peningkatan dari tahun 2013 hingga tahun 2015. Dengan meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia, maka semakin tinggi mutu sumber daya manusia di Indonesia. Dari tabel diatas, pada tahun 2015 Provinsi Sumatera Selatan memiliki tingkat Indeks Pembangunan Manusia sebesar 67,46 %,

dimana angka tersebut masih terbilang rendah dibandingkan Provinsi-provinsi lainnya di Indonesia terutama pada Provinsi-provinsi yang ada di Pulau Sumatera.

Tabel 1.3
IPM Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013-2015

PROVINSI	2013	2014	2015
SUMATERA SELATAN	66,16	66,75	67,46

Sumber: Badan Pusat Statistik, IPM Provinsi dan Nasional 2010-2016

Dari tabel 1.3 di atas, terlihat bahwa Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Sumatera Selatan dari tahun 2013-2015 terus mengalami peningkatan. Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2013 yaitu 66,16 poin, pada tahun 2014 yaitu 66,75 poin, dan pada tahun 2015 yaitu 67,46 poin.

Dengan melihat angka IPM Provinsi Sumatera Selatan, maka peran yang diemban pemerintah semakin penting karena pemerintah dituntut harus mampu melakukan fungsi alokasi atas pelayanan publik seperti kesehatan, pendidikan, serta infrastruktur lainnya agar tercapai kesejahteraan sosial masyarakat yang menyangkut konsep pembangunan manusia.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan suatu indikator untuk mengetahui kondisi perekonomian di suatu wilayah atau suatu Provinsi, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) biasanya digunakan untuk menilai kondisi perekonomian suatu wilayah apakah dalam kondisi baik atau buruk. Selain itu, PDRB juga bisa mengukur total pendapatan perkapita atau total pendapatan semua orang dalam perekonomian. Hal ini juga termasuk total belanja pemerintah dan masyarakat dalam membeli suatu barang atau jasa,

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan statistik perekonomian yang sangat diperhatikan karena dianggap sebagai ukuran akhir yang terbaik dalam mengetahui kesejahteraan masyarakat. Sehingga, PDRB biasa digunakan sebagai tolak ukur dalam melihat pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia. Hal ini dikarenakan PDRB dapat melihat total pendapatan dan pengeluaran masyarakat secara bersamaan.

Adapun beberapa manfaat perhitungan Pendapatan Nasional yang menjadikannya indikator makro ekonomi yang paling mudah untuk mengetahui perkembangan struktur perekonomian (Yuliadi, 2007) antara lain: a) mengetahui dan menelaah struktur dan susunan perekonomian, b) membandingkan perekonomian dari waktu ke waktu, c) membandingkan perekonomian antar daerah, d) merumuskan kebijakan pemerintah.

Infrastruktur sama dengan prasarana yaitu segala sesuatu yang menjadi penunjang utama terselenggaranya suatu proses. Infrastruktur merupakan salah satu indikator utama dalam melihat kemajuan suatu wilayah. Infrastruktur itu sendiri, di bagi menjadi dua bagian yaitu transportasi dan energi. Pada bagian transportasi, peningkatan infrastruktur dilihat dari peningkatan akses mobilitas masyarakat terkait kemudahan masyarakat dalam menjalankan aktivitas hariannya. Sedangkan pada bagian energi infrastruktur berperan dalam memberikan tingkat kesejahteraan berupa pemerataan tingkat kelayakan hidup masyarakat. Hal ini dimaksud adanya pendistribusian energi berupa listrik serta pasokan air bersih. Berdasarkan penjelasan tersebut infrastruktur juga memiliki pengaruh dalam peningkatan

Indeks Pembangunan Manusia. Hal ini dikarenakan dengan adanya peningkatan infrastruktur dapat mendorong tingkat kesejahteraan masyarakat. Sehingga, dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat berarti juga dapat meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia yang ada.

Di dalam Indeks Pembangunan Manusia, sektor pendidikan merupakan salah satu sektor yang memiliki peran untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia. Peningkatan tersebut, berupa peningkatan dari segi kualitas dan kuantitas dari sektor pendidikan itu sendiri. Peningkatan tersebut harus diiringi dengan peningkatan anggaran pemerintah di sektor pendidikan. Hal ini dimaksudkan agar terjadinya peningkatan baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Anggaran Pemerintah di Sektor Pendidikan nantinya akan direalisasikan dalam bentuk penyelenggaraan kegiatan yang bertema pendidikan, seperti pelatihan skill, seminar atau workshop, ataupun kegiatan yang berfungsi untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Selanjutnya, realisasi anggaran juga dapat di peruntukkan untuk meningkatkan sarana dan prasarana yang memadai serta penambahan alat penunjang di bidang pendidikan lainnya. Dengan demikian, anggaran pemerintah dapat terrealisasi dengan baik pada proses peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) agar meningkatnya kuantitas dan bermutu tinggi.

Alasan peneliti memilih seluruh kabupaten/ kota Provinsi Sumatera Selatan sebagai objek penelitian, dalam penelitian ini Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Sumatera Selatan selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahunnya walaupun peningkatan tersebut tidak terlalu signifikan dan

masih relatif rendah dibandingkan dengan Provinsi lainnya di pulau Sumatera. Peningkatan angka Indeks Pembangunan Manusia merupakan fenomena menarik karena Indeks Pembangunan Manusia dapat menggambarkan pencapaian kinerja dalam mengembangkan sumber daya manusia yang handal untuk membangun perekonomian di suatu wilayah. Maka dari itu, penulis tertarik untuk menelaah lebih lanjut melalui penelitian yang berjudul, **“ANALISIS FAKTOR–FAKTOR YANG MEMPENGARUHI INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DI PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2013 – 2015”**.

B. Batasan Masalah Penelitian

Sehubungan dengan faktor keterbatasan yang ada dan mengingat banyaknya faktor yang mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia, maka penelitian hanya berfokus pada :

1. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Indeks Pembangunan Manusia kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2013-2015.
2. Variabel independen yaitu Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2013-2015, Infrastruktur Listrik kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2013-2015, dan Belanja pemerintah di Bidang Pendidikan kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2013-2015.
3. Variabel ini menggunakan data panel di lima belas kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2013-2015.

C. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini:

1. Bagaimana pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) kabupaten/kota terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Sumatera Selatan tahun.
2. Bagaimana pengaruh Infrastruktur Listrik kabupaten/kota terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Sumatera Selatan tahun.
3. Bagaimana pengaruh Belanja Pemerintah di Bidang Pendidikan kabupaten/kota terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Sumatera Selatan.

D. Tujuan Penelitian

Ada pun, tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) kabupaten/kota terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2013-2015.
2. Untuk mengetahui pengaruh Infrastruktur Listrik kabupaten/kota terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2013-2015.
3. Untuk mengetahui pengaruh Belanja Pemerintah di Bidang Pendidikan kabupaten/kota terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2013-2015.

E. Manfaat Penelitian

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi beberapa pihak, yaitu:

1. Bagi Penulis

Dapat menambah ilmu serta wawasan tentang hal yang diteliti sehingga mampu membandingkan antara teori yang diterima selama perkuliahan dan realita di lapangan.

2. Bagi Mahasiswa

Hasil penelitian ini menjadi bahan masukan dan pengetahuan bagi pembaca mengenai peranan produk domestik regional bruto, jumlah sekolah, dan kualitas infrastruktur kabupaten/kota terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2013-2015.

3. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi kepada masyarakat mengenai kondisi Indikator Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Sumatera Selatan.

4. Bagi Pemerintah Daerah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran serta sebagai bahan masukan dalam penentuan sebuah kebijakan Pemerintah Daerah terutama dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia ke depannya.